

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	INVESTOR INDONESIA	12	23-08-2002

PLN Minta Bukit Asam Konsisten Harga Batubara

Jakarta, Investor

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta PT Bukit Asam (BA), konsisten dalam memberlakukan harga jual batubara, mengingat dampaknya akan berpengaruh pada ketersediaan suplai listrik untuk masyarakat. Pasalnya, sejak BA berencana melakukan *initial public offering* (IPO), harga produknya akan terjadi perubahan.

"Keinginan PLN supaya harga batubara stabil, karena sejak BA berencana IPO, ada rencana perubahan baik harga maupun jumlah karena sebagian akan diekspor," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PLN Tunggono, Kamis (22/8), di Jakarta.

Meski saat ini pasokan batubara dari BA relatif lancar, kata Tunggono, jika harga mengalami perubahan, maka akan membebankan keuangan PLN. Ditegaskan, pihaknya meminta agar kelancaran pasokan tetap dijamin mengingat sesuai kontrak dan komitmen yang ada bahwa keberadaan BA, harus memasok kebutuhan PLN yaitu untuk kebutuhan bahan bakar bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. "Jangan sampai, kalau harga di pasar sedang jelek kita disuruh beli, tapi kalau harga bagus mereka malah ekspor," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada BA, Corporate Secretary Munandar mengatakan, pihaknya menjamin bahwa pelaksanaan IPO tidak akan merubah harga batubara untuk PLN. "Tentu saja rencana IPO tidak akan ubah harga untuk PLN, karena harga yang kita terapkan mengikuti dari luar, sekarang harga dalam negeri lebih dari di luar," katanya.

Namun, diakui pihak BA saat ini sedang mengalami kendala dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengenai besaran tarif pengangkutan batubara, sehingga mengganggu suplai ke PLTU Suralaya. KAI, katanya, memasang tarif angkutan yang terlalu memberatkan BA, yang selama ini sebesar Rp 28 ribu per ton untuk jarak 420 km, menjadi Rp 45 ribu per ton. "Itu kenaikannya terlalu signifikan, kalau tersedot di situ saja dengan kapasitas 7 juta ton, berapa miliar tambahan biaya yang harus kita keluarkan," katanya. BA sendiri telah menawar dengan harga Rp 32 ribu per ton, dengan kenaikan yang ditinjau setiap tahun, namun hingga kini belum mendapat titik temu.

Setiap tahun, kata Munandar, BA memasok batu bara untuk PLTU Suralaya sebesar 12 juta ton per tahun. Namun, karena kondisi belum optimal, maka BA hanya mampu memasok 6-7 juta ton. Perusahaan, lanjutnya telah membantu melalui pembelian pengadaan gerbang sebanyak 87 unit senilai Rp 50 miliar, namun ternyata tidak bisa mendongkrak pencapaian target.

Ternyata, ungkap Munandar, menurut kabar yang ada kondisi rel di Sumsel sepanjang 50 km rusak berat dan harus diganti. "Jadi, masalah ini bukan wewenang KA sendiri," katanya.

Atas kondisi itu, pihak PLTU Suralaya saat ini, menurut Munandar, tidak berani mengandalkan 100 persen batu bara dari BA, karena dampaknya akan fatal terhadap pasokan listrik, mengingat 30 persen listrik dari Suralaya untuk konsumen di wi-

layah Jawa - Bali. "Mereka mendatangkan dari Kalimantan. Bahkan dulu mengimpor dari Cina, Australia. Sekarang mereka patok BA menggaransi 6,1 juta ton dan, sisanya mereka cari dari luar," paparnya.

Tingkat Menteri

Untuk mengatasi masalah ini, Munandar menyatakan, sebelumnya sudah ada pertemuan antara direksi KAI dengan BA, namun karena masalahnya juga meyangkut ketersediaan suplai listrik bagi masyarakat, maka pembicaraan akan ditingkatkan di tingkat menteri, yaitu Meneg BUMN, Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Sekarang dibiarkan di tingkat kementerian karena semuanya merupakan sektor strategis. Mudah-mudahan ada satu kesepakatan. Misalnya ada kemungkinan Indonesia Power (IP) (Anak perusahaan PLN, pengelola Suralaya, red) membantu menyesuaikan harga beli batubara. Jadi tidak asal di naikkan," papar Munandar.

Dikatakan, berdirinya BA merupakan *integrated project* dengan PLTU Suralaya, KAI bahkan dengan Pelayaran, sehingga penyelesaiannya harus koordinatif. "Jadi, baiknya jangan melupakan historis," ujarnya.

Sementara berkaitan dengan rencana pelaksanaan IPO, Munandar mengatakan, bahwa pada tanggal 26 Agustus mendaftarkan pihaknya akan melakukan pelaporan kepada Bapepam mengenai kelengkapan lembaga penunjang seperti under writer, legal audit financial advisor dan lainnya. (C21)